

## **Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Dalam Memaksimalkan Tugas UPTD Pengelolaan Sampah di Kota Binjai**

### **Implementation of the Mayor's Regulation Policy in Maximizing the Duties of the Waste Management UPTD in Binjai City**

**Dhimas Prayuda**

Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,  
Medan, Indonesia

\*email: dhimasprayuda032002@gmail.com

#### **ABSTRACT**

*Binjai City is an area located in North Sumatra Province, but it is not free from rubbish. Waste is one of the main problems that arises as a result of human activities. The increasing human population causes an increase in human activity which also increases the remaining results of human activity itself, as well as sources of the results of human activity and natural processes which are considered to have no economic value, and can even have negative economic value because they require quite large management costs. . In order to realize good waste management, this is the aim of implementing Law Number 18 of 2008 concerning Waste Management in the City of Binjai. To find out the obstacles faced by the City Government, especially the Binjai City Environmental Service, in carrying out its authority and the regulations implemented. Method The research that will be used in this thesis is a descriptive method with qualitative analysis. Data analysis is used by reviewing the results of interviews which include strategic aspects in the system or process of implementing policies, goals and objectives to be achieved in implementing policies, the process of implementing and maximizing functional and main tasks. The theory that I use is Tachjan, which in terms of the level of success of an implementation is the implementation element, the program being implemented, the target group and the presence of environmental, social, cultural and political factors. From the results of the study or analysis of data from interviews regarding these aspects, it was concluded that the implementation of Binjai Mayor Regulation No. 18 of 2008 concerning Waste Management in Binjai City carried out by the Binjai City Environmental Service has generally gone well, but there are still shortcomings and Obstacles in its implementation are caused by several factors such as deficiencies in facilities that hinder effectiveness in controlling, lack of employee performance, unclear financial funds, less effective communication and information towards the community, and policies that have never been updated.*

**Keywords:** Policy Implementation, Waste Management, Maximization, Main Tasks and Functions

#### **ABSTRAK**

Kota Binjai merupakan daerah yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Namun tidak terlepas dari sampah. Sampah ialah salah satu masalah pokok yang muncul akibat dari adanya aktivitas manusia. Semakin bertambahnya populasi manusia yang menyebabkan peningkatan aktivitas manusia yang juga meningkatkan sisa dari hasil aktivitas manusia itu sendiri, serta sumber hasil aktivitas manusia maupun proses-proses alam yang dipandang tidak mempunyai nilai ekonomi bahkan dapat mempunyai nilai ekonomi negatif karena memerlukan biaya pengelolaan yang cukup besar. Dalam rangka mewujudkan pengelolaan sampah yang baik merupakan tujuan dari penerapan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Binjai. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota khususnya Dinas lingkungan Hidup Kota Binjai dalam menjalankan wewenangnya dan

peraturan yang diterapkan. Metode penelitian yang akan digunakan dalam skripsi ini adalah metode deskriptif dengan analisis kualitatif. Analisis data yang digunakan dengan mengkaji hasil wawancara yang meliputi aspek-aspek strategi dalam sistem atau proses pelaksanaan kebijakan, tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam implementasi kebijakan, proses melaksanakan dan memaksimalkan tugas fungsi dan pokok. Adapun teori yang digunakan yaitu Tachjan yang dimana dari segi tingkat keberhasilan suatu implementasi yaitu adanya unsur pelaksanaan, adanya program yang dilaksanakan, adanya kelompok sasaran serta adanya faktor lingkungan, sosial, budaya dan politik. Dari hasil kajian atau analisis data hasil wawancara tentang aspek-aspek tersebut maka diperoleh kesimpulan bahwa implementasi Peraturan Walikota Binjai Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Binjai yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai secara umum sudah berjalan dengan baik hanya saja masih terdapat kekurangan dan hambatan dalam pelaksanaannya karena disebabkan oleh beberapa faktor seperti kekurangan pada fasilitas yang menghambat keefektifitasan dalam penertiban, kurangnya kinerja pegawai, dana finansial yang belum jelas, komunikasi serta informasi yang kurang efektif terhadap masyarakat, dan kebijakan yang belum pernah diperbaharui kembali

**Kata Kunci:** Implementasi Kebijakan, Pengelolaan Sampah, Memaksimalkan, Tugas Pokok dan Fungsi.

## **Pendahuluan**

Kota Binjai merupakan daerah yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Namun tidak terlepas dari sampah. Sampah ialah salah satu masalah pokok yang muncul akibat dari adanya aktivitas manusia. Semakin bertambahnya populasi manusia yang menyebabkan peningkatan aktivitas manusia yang juga meningkatkan sisa dari hasil aktivitas manusia itu sendiri. Sampah pada dasarnya merupakan suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari suatu sumber hasil aktivitas manusia maupun proses-proses alam yang dipandang tidak mempunyai nilai ekonomi, bahkan dapat mempunyai nilai ekonomi negatif karena memerlukan biaya pengelolaan yang cukup besar. Penelitian ini bertujuan untuk Implementasi Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2018 tentang pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pengelolaan sampah dan tempat pemrosesan akhir pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah kota khususnya Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai dalam menjalankan wewenangnya dan peraturan yang diterapkan.

Penyebab banyaknya sampah di kota besar, bukan hanya korban dari tidak adanya wadah yang disediakan pemerintah melainkan kebiasaan setiap masyarakat yang senonoh akan membuang sampah sembarangan tanpa menjaga kebersihan lingkungan tetapi tidak hanya itu ada juga faktor faktor yang menyebabkan sampah sulit untuk dipecahkan dikarenakan kurangnya fasilitas pemerintah dalam memekanismekan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai. Kebiasaan dalam arti habit seseorang yang dilakukan tanpa adanya tekanan. Pemerintah resah

melihat keadaan lingkungan yang memilukan tersebut. Sebab, fenomena sampah mencerminkan kegagalan negara dalam mengurus permasalahan kependudukan. Citra Indonesia dimata dunia pun memburuk oleh sebab bertambahnya jumlah penduduk maka akan juga bertambah jumlah populasi mengenai permasalahan sampah. Maka, sejumlah langkah pun diambil untuk mengurangi jumlah sampah. Kemudian pemerintahan kota mengeluarkan Peraturan Walikota tentang penanganan sampah seperti isi Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2023 tentang aturan tata cara penerapan sanksi administrasi terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 6 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat Pasal 15 bahwa membuang dan/atau menumpuk, membakar kotoran/ sampah di jalur hijau serta di taman kota yang tidak pada tempatnya adalah perbuatan melanggar hukum.

Adapun hasil penertiban gelandangan dan pengemis di Dinas Lingkungan Hidup di Kota Binjai oleh sebab itu, kita wajib mencari cara menyelesaikan masalah lingkungan tersebut. Segala aturan yang bersifat represif sedapat mungkin dihindari karena tidak akan menyelesaikan persoalan. Untuk menekan jumlah permasalahan sampah, harus dikaji terlebih dahulu akar masalahnya. Kalau dulu persoalannya adalah faktor sumber daya, perekonomian maka pemerintah mestinya bergegas untuk membuat kebijakan dan langkah menyejahterakan Masyarakat.

Walaupun telah ada upaya Pemerintah Kota Binjai untuk membuat kebijakan-kebijakan penanganan sampah, namun ternyata masih belum bisa menjangkau permasalahan sampah secara keseluruhan. Bahkan masih banyak sampah yang sudah dilakukan pembinaan, namun masih ada lagi kebiasaan Masyarakat membuang sampah sembarangan. Terlepas dari pembinaan yang diberikan kepada pengelolaan sampah agar mereka terampil dan menerapkan dalam diri bahwasannya kebersihan sebagian dari iman dalam menuju kedewasaan nantinya, hal terpenting yang juga harus diperhatikan oleh Dinas Lingkungan Hidup adalah pembinaan terhadap pengelolaan sampah tersebut. Jika karena kondisi ekonomi keluarga yang kurang mendukung menjadi faktor tidak dapat membayar uang iuran kebersihan ataupun membeli bak sampah, maka pembinaan terhadap keluarga yang harus dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup adalah dengan pemberdayaan ekonomi keluarga yang menciptakan kemandirian, sehingga akhirnya dengan berbagai program pembinaan yang diberikan, baik akan mempermudah pemerintah dalam memecahkan permasalahan pengelolaan sampah dengan mudah.

Dalam penulisan jurnal ini penulis menggunakan teori implementasi kebijakan. Menurut Anderson, kebijakan publik adalah suatu tindakan yang tujuannya ditentukan oleh satu atau lebih aktor untuk memecahkan masalah publik. Disisi lain, Carl J Frederick sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008:7) menunjukkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu yang menghadirkan hambatan dan peluang untuk mencapai atau menerapkan sebuah tujuan.

### **Metode Penelitian**

Adapun penelitian ini menggunakan metode kualitatif bahwa metode penelitian kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, catatan-catatan yang berhubungan dengan makna, nilai serta pengertian. Selain itu metode kualitatif senantiasa memiliki sifat holistik, yaitu penafsiran terhadap data dalam hubungannya dengan berbagai aspek yang mungkin ada dalam konteks ini menggunakan berbagai macam metode ilmiah dengan teknik pengumpulan data penelitian kualitatif dan penulisan yang digunakan adalah dengan menggunakan metode studi pustaka. Studi pustaka merupakan salah satu jenis penelitian kualitatif dimana teknik pengumpulan data dapat diambil dari dokumenter yang tertulis baik surat kabar, majalah, artikel, dan sejenisnya (Mahardika & Nalar Rizki, 2021). Adapun dalam penulisan ini, penulis ingin mendeksripsikan Implementasi Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2018 di Kota Binjai terkait memkasimalkan tugas pokok dan fungsi UPTD pengelolaan sampah di Kota Binjai, yang dimana kemudian dalam mencari suatu hasil permasalahan yang terjadi, penulis menggunakan surat kabar, naskah, arikel serta jurnal terkait dalam judul penulisan yang diangkat.

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Berdasarkan Badan Pusat Pengelolaan Sampah belum efektifnya kebijakan penanganan kinerja tugas pokok dan fungsi pengelolaan sampah oleh Walikota Binjai tersebut, maka perlu dilakukan kajian untuk menganalisis Pemerintah Kota Binjai dalam pembinaan masalah pengelolaan sampah. Kebijakan publik merupakan suatu rangkaian yang mana melingkupi rencana, aktivitas, aksi, keputusan, dan sikap untuk bertindak maupun tidak yang dilakukan oleh para aktor sebagai suatu tahapan dalam suatu permasalahan publik yang sedang dihadapi.

Makmur dan Thahier (2016); Agustino (2016), kebijakan publik lahir karena adanya tuntutan dari fenomena kehidupan manusia, yang berinteraksi langsung dan intensif antara para aktor karena adanya alat pengaturan yang jelas dan tegas dalam penciptaan solusi terhadap dinamika kehidupan. Kebijakan publik berfungsi untuk mengatur, mengarahkan dan mengembangkan dinamika interaksi baik di dalam komunitas maupun antara komunitas dengan lingkungannya sehingga memperoleh kebaikan yang efektif.

Tingkatan dalam proses kebijakan publik yang dapat mengukur dan memberikan penilaian bahwa program yang dilaksanakan berhasil atau tidak adalah evaluasi. Mulyadi (2016:100) bahwa evaluasi adalah cara untuk menilai apakah sebuah kebijakan atau program tersebut berjalan dengan baik atau tidak. Evaluasi memberikan hasil yang valid tentang informasi kebijakan, salah satu aktivitas fungsional dalam evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan dengan mengikuti aktivitas-aktivitas sebelumnya, yaitu formulasi, implementasi kebijakan tetap dapat terjadi pada seluruh aktivitas-aktivitas fungsional yang lain dalam proses kebijakan (Saputra & Ali, 2020).

Menurut (Noviah et al., 2019) menyebutkan bahwa implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau badan peradilan lainnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang di hadapi dengan berbagai cara. Terkait permasalahan yang ada dalam penelitian ini menggunakan teori Tachjan untuk mempermudah penelitian agar terkemukannya inti permasalahan ataupun faktor-faktor yang memperhambat berjalannya suatu implementasi kebijakan yaitu:

1. Adanya unsur pelaksanaan,
2. Adanya program yang dilaksanakan,
3. Adanya kelompok sasaran
4. Adanya faktor lingkungan, sosial, budaya dan politik

Suatu pilihan-pilihan kebijakan yang sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat, maka potensi konflik yang ada di masyarakat tidak muncul. Apalagi di satu sisi, Pemerintah Kota Binjai menempatkan Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai untuk mengakomodasi dan merangkul kelompok-kelompok yang ada di masyarakat dan mampu untuk memberikan ruang komunikasi antara Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai dengan masyarakat. Selain itu, sikap

kepala dinas yang tidak eksklusif dan tidak berbaur bersama masyarakat membuat masyarakat merasa memiliki jarak dengan kepala petugas Dinas lingkungan hidup. Sikap kepala Dinas tersebut membuat saluran komunikasi masyarakat terhadap petugas semakin tertutup sehingga masyarakat, tertutupnya saluran komunikasi mengenai peraturan daerah maka akan terbukanya kondisi suatu permasalahan yang dialami masyarakat dan membantu memberikan suatu keterangan agar dinas sosial pun dapat memecahkan suatu permasalahan sampah yang ada di Kota Binjai. Kemampuan untuk berkomunikasi dan menampung aspirasi warga masyarakat ini juga merupakan faktor yang membuat potensi konflik bahwasanya peraturan walikota tersebut tidak sampai di telinga masyarakat. Tidak hanya itu banyak faktor yang mempengaruhi kinerja tugas pokok dan fungsi pengelolaan sampah, dapat dilihat bahwasannya banyak kondisi perekonomian rendah yang sangat memicu adanya sampah dimana saja sehingga Masyarakat tidak dapat membayar tarif serta membeli bak sampah seharusnya pemerintah memberikan suatu gerakan yang dapat merubah prinsip predator tersebut agar merubah pola pikir dari membuang sampah sembarangan menjadi kebiasaan untuk hidup *go green* dan bebas akan sampah serta mengubah citra indonesia. Seperti adanya bertambah luasnya kinerja sumber daya manusia sesuai dengan bagian.

Bahwasannya dalam memberikan informasi terkait kebijakan Perwal Nomor 8 Tahun 2018 tersebut telah terlihat sudah adanya berjalan, namun disini dapat dilihat bersama, bahwasannya dalam faktor pelaksana kebijakan ini kurang maksimal. Dimana dalam hal ini para pelaksana kebijakan tidak melaksanakan kebijakan, apalagi dalam kasus ini dapat dilihat sikap pelaksana yang tidak maksimal dalam menjalankan suatu kebijakan publik, sehingga dalam kasus ini masih banyak terlihat masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Dari penelitian yang dilakukan diharapkan dapat diketahui karakteristik predator yang ada di Kota Binjai. Dengan mengetahui karakteristik predator diharapkan kebijakan kelompok akan tepat sasaran, dengan demikian dapat meminimalisir jumlah sampah yang ada di Kota Binjai akan semakin berkurang dan menciptakan kota bersih dan dapat teratasi.

## **Penutup**

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan kinerja tugas pokok dan fungsi di Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai secara

umum atau secara fakta dapat dikatakan belum optimal. Terdapat kekurangan dan hambatan dalam pelaksanaannya karena disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya fasilitas yang menghambat keefektifan dalam penertiban, sumber daya manusia dalam kinerja pegawai, komunikasi yang kurang efektif terhadap masyarakat, kelompok sasaran yang belum membuat rasa jera kepada masyarakat dan kebijakan yang belum pernah diperbaharui kembali.

Adapun kategorisasi yang menjadi tolak ukur dari beberapa pertanyaan ialah yang pertama adanya proses penyampaian informasi mengenai peraturan Walikota Binjai Nomor 7 Tahun 2018 dalam rangka memaksimalkan tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pengelolaan sampah di Kota Binjai dapat disimpulkan bahwasannya belum terimplementasi. Hal ini berdasarkan:

a. Adanya Unsur Pelaksana

Berdasarkan pelaksana berkaitan dengan tingkat kepatuhan para pelaksana dan petugas lapangan dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah sudah cukup maksimal, walaupun masih ada juga aparatur dan petugas lapangan yang melaksanakan tupoksi di luar peraturan yang ada. Sedangkan kalau untuk insentif/ *reward* diberikan bagi orang yang melakukan pengurangan sampah serta pengolahan sampah, belum ada karena masih terkendala dengan anggaran biaya. Unsur para pelaksana dalam implementasi suatu kebijakan sangat menentukan akan keberhasilan suatu kebijakan.

b. Adanya Program yang Dilaksanakan

Bahwa berdasarkan program yang dilaksanakan telah terkoordinasi dengan baik dan telah adanya *standard operating procedur* (SOP) namun untuk pelaksanaannya belum sepenuhnya memenuhi *standard operating prosedur* (SOP). Sedangkan untuk pembagian tugas dalam pelaksanaan kebijakan perda tentang pengelolaan sampah di Kota Binjai sudah jelas agar program dalam suatu kebijakan sangat diperlukan dalam keberhasilan suatu kebijakan.

c. Adanya Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran adalah bagian dari pihak-pihak yang terlibat diharapkan untuk mengadopsi strategi pemasaran perusahaan melalui model interaksi yang diinginkan. Mereka termasuk pemangku kepentingan yang diharapkan menerima dan beradaptasi dengan model interaksi yang ditentukan oleh kebijakan. Keberhasilan proses implementasi kebijakan dapat dilihat dari respon atau daya tanggap kelompok sasaran. Jika kelompok sasaran bersedia

menerima dan melaksanakan kebijakan yang ditetapkan tanpa ada yang mengeluh, maka kebijakan tersebut akan berhasil.

d. Adanya Faktor Lingkungan, Sosial, Budaya dan Politik

Terkait hal yang harus dilihat supaya bisa menilai kinerja pelaksanaan kebijakan ialah sejauh mana lingkungan luar ikut mendukung keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi serta politik yang tidak mendukung bisa menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena sebab itu, upaya pelaksanaan kebijakan memberi syarat keadaan lingkungan luar yang mendukung. Kegiatan implementasi suatu kebijakan tidak akan bisa berlangsung dengan baik tanpa adanya sumber daya yang dibutuhkan dalam proses implementasi kebijakan. Sumber daya adalah salah satu faktor yang berarti dalam melakukan kebijakan publik. Sumber daya yang penting meliputi staf yang mencukupi serta keahlian-keahlian yang baik untuk melakukan tugas-tugas mereka, informasi, wewenang serta fasilitas yang dibutuhkan untuk menterjemahkan pendapat pendapat diatas kertas agar bisa melakukan pelayanan-pelayanan publik Sumber daya yang dibutuhkan dalam implementasi kebijakan itu meliputi sumber daya manusia, sumber daya keuangan/ anggaran, dan sumber daya peralatan (gedung, peralatan, tanah, dan sebagainya)

### **Ucapan Terima Kasih**

Dalam penyelesaian jurnal ilmiah ini penulis juga mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan masukan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan jurnal ilmiah ini. Penulis menyadari bahwa penulisan jurnal ilmiah ini masih jauh dari kata sempurna dan mengharapkan kritik dan saran kepada peneliti lainnya.

### **Daftar Pustaka**

- Ananda, D., Rusta, A., & Fajri, M. (2023). Implementasi Peraturan Daerah Kota Bukittinggi No. 8 Universitas Andalas Email: Keberadaan sektor informal menjadi salah yang masih marak dijumpai di tengah-satu sektor informal yang paling banyak usaha usahanya dapat. 3(1), 1–11.
- Arma, N. A., Syahfitri, A., & Simon, J. (2023). Implementasi Kebijakan Dinas Perhubungan Kota Medan Dalam Menanggulangi Parkir Liar Di Tepi Jalan Umum Kecamatan Medan Marelan. *Warta Dharmawangsa*, 17(2), 922–942. <https://doi.org/10.46576/wdw.v17i2.3200>
- Agustino, Leo. (2006). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung:Alfabeta.

- Mahardika, A., & Nalar Rizki, R. (2021). Analisis Implementasi Kebijakan Penataan Pasar Tradisional Dan Toko Modern di Kota Medan. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(10), 1647–1654. <https://doi.org/10.36418/jiss.v2i10.431>
- Noviah, E., Badrujaman, A., & Rahayu, W. (2019). Penelitian Pendahuluan Analisis Implementasi Perencanaan Istimewa (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kota Tangerang). Seminar Nasional Pendidikan, FKIP UNMA, 1076–1082. <https://prosiding.unma.ac.id/index.php/semnasfkip/article/view/153/152>
- Saputra, A., & Ali, K. (2020). Analisis Kebijakan Pariwisata Terhadap Pengelolaan Objek Wisata di Kabupaten Samosir. *Warta Dharmawangsa*, 14(4), 564–584. <https://doi.org/10.46576/wdw.v14i4.889>